

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON

Johana Simorangkir¹, Andreuw Kristian Pantow², Decire Dumingkan Wagiu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

Email : johanasimorangkir06@gmail.com

Abstract

The Tomohon City Regional Financial and Revenue Management Agency is a government agency which has the task of carrying out government affairs in the field of regional financial and revenue management. This research is to find out how the regional financial accounting system is implemented. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. The data collection techniques used were interviews, observation, document analysis with research time from February-May 2024. In this research the author collected primary data and secondary data. So the results can be concluded that the implementation of the accounting system has not been effective and efficient. There are several things that need to be improved, so that errors do not occur in the income accounting system. The author suggests that agencies implement the income accounting system in Tomohon City better so that they can obtain maximum results.

Keywords: Implementation of Regional Financial Accounting Systems

Abstrak

Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelola keuangan dan pendapatan daerah. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, observasi, analisis dokumen dengan waktu penelitian dari bulan Februari- Mei Tahun 2024. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Sehingga Hasil dapat di simpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi belum efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan, agar tidak terjadi kesalahan dalam sistem akuntansi pendapatan. Penulis menyarankan instansi agar pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan di Kota Tomohon di laksanakan lebih baik sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Kota Tomohon salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Tomohon dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Tomohon dan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan pemerintah tentang susunan organisasi pemerintah BPKPD Kota Tomohon yaitu membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Dharmadiaksa, 2014; Pujanira & Taman, 2017). Sistem akuntansi keuangan yang di maksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan (Kartoprawiro & Susanto, 2018).

Kota Tomohon adalah salah Kota yang ada di Sulawesi Utara yang di tuntut dalam pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan daerah yang sesuai. Namun Pada kenyataannya masih banyak masalah hambatan-hambatan yang dilalui dalam penyusunan laporan keuangan sehingga penyampaian laporan keuangan belum tepat waktu sehingga tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berlandaskan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang berisi tentang standar akuntansi Pemerintah dan hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya efektifitas dan efisiensi pelaporan keuangan. Salah satu upaya yang di lakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penerapan sistem akuntansi pendapatan, salah satunya pendapatan asli daerah yang di peroleh dari nilai kekayaan bersih. Dalam sistem akuntansi pendapatan di Kota Tomohon di lakukan mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatan asli daerah yang beradadalam wewenang SKPD.

Salah satu upaya yang di lakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, n.d.). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Peneletian yang dilakukan oleh (Anto et al., 2021) menemukan penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur berupa jaringan dan fasilitas yang memadai dan masalah kesiapan Sumber Daya Manusia. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Maulana Yusuf et al., 2022) menemukan sistem penyusunan laporan keuangan pada BAKEUDA kabupaten Tebo telah menggunakan aplikasi sistem manajemen daerah (SIMDA) yang lebih memudahkan bagian keuangan dan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan besar sangat kompleks. Kompleksitas sistem tersebut disebabkan oleh kekhususan dari sistem yang dirancang untuk suatu organisasi bisnis sebagai akibat dari adanya perbedaan kebutuhan akan informasi oleh manajer (Halim, 2008). Akuntansi sektor publik berkembang tidak hanya sebagai sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Agustyawati, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrualbasis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi dicatat menggunakan accrual basis
2. Asset diukur menggunakan historical cost
3. Depresiasi untuk asset tetap
4. Accrual basis pada pendapatan dan beban
5. Cash basis pada Laporan Realisasi Anggaran

Sistem Akuntansi Pendapatan

Pendapatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah Usaha. Untuk membuat suatu Usaha yang tertata rapih dan sistematis diperlukan sebuah Sistem Informasi Akuntansi (Tuasamu et al., 2023). Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan – perkiraan yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Masing – masing elemen dari laporan keuangan dapat bertambah maupun berkurang.

Sistem Akuntansi Daerah Kota Tomohon

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 185 disebutkan bahwa akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah daerah (SAPD) dan Bagan Akun StandarBAS. SAPD tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan suatu Instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip Akuntansi yang telah ditetapkan SAP dan kebijakan Akuntansi. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menunjukkan rangkaian proses Akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, Menjurnal ke dalam buku besar, Menyusun neraca saldo, Menyusun kertas kerja Konsolidasian, dan di akhiri dengan penyusunan laporan keuangan.

Dokumen Yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan LO dan LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)
3. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
4. Surat Tanda Setoran (STS)
5. Bukti Transfer/Setor
6. Nota Kredit Bank
7. Bukti Memorial
8. Bukti Transaksi Penerimaan Kas Lainnya

Sistem Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas adalah suatu prosedur catatan mengenai kas yang diterima perusahaan baik yang berupa tunai maupun surat-surat berharga dari berbagai macam sumber pendapatan seperti penjualan tunai, pelunasan piutang yang dapat menambah kas perusahaan. Sistem pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap penerimaan kas (Angow et al., 2023). Penerimaan kas merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintahan untuk membangun program pembangunan pemerintahan (Bilalang et al., 2021).

Sistem Pengeluaran Kas

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut Depdiknas Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu proses, cara, perbuatan mengeluarkan alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lainnya yang dapat diambil sewaktu-waktu. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk melaksanakan pengeluaran kas baik dengan cek maupun uang tunai untuk kegiatan perusahaan. Sistem Akuntansi pokok yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan melalui dana kas kecil. Pengeluaran uang tunai pada pemerintahan merupakan komponen yang sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Di departemen Pengeluaran kas pada pemerintahan memiliki sistem dan prosedur yang mengendalikan pengeluaran uang tunai (Bawonse & Tinangon, 2021; Renaldo & Sunaningsih, 2021).

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dapat juga di pahami sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat dikaitkan bahwa semakin besar kontribusi keluaran yang di hasilkan terhadap nilai sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pada unit tertentu. Efisiensi adalah istilah yang dipakai untuk mengukur kemampuan pemanfaatan asset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu efisiensi berkaitan dengan bagaimana seharusnya suatu asset dikelola. Efisiensi di ukur dengan sebagaimana seharusnya penggunaan asset atau membatasi hal-hal yang mubazir, pengukuran diperlukan untuk banyak hal dalam rangka

pengembangan bisnis. Oleh karena itu efisiensi ini berkaitan dengan rantai nilai (value chain), yaitu keterkaitan antar aktifitas yang dilakukan dalam menciptakan barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded (Murdiyanto, 2020). Maka penelitian akan memperoleh petunjuk dan cara kerja dan tata cara pemecahan masalah secara sistematis dari penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan. Proses penelitian ini lebih menekankan pada pemikiran, pemahaman dan persepsi terhadap topik dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat Di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kota Tomohon yang berada di kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon Sulawesi Utara. Adapun waktu yang di manfaatkan untuk melakukan dan mengumpulkan data penelitian, yaitu bulan februari sampai dengan juni 2024.

Sumber Data

Jenis data yang di kumpulkan terdiri data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber yang langsung memberi datanya kepada peneliti melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu laporan pendapatan daerah pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon (Sugiyono, 2022). Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberi data kepada peneliti, data tersebut bisa di dapatkan melalui sumber yang di gunakan bersumber dari jurnal penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang di gunakan bersumber dari jurnal penelitian dan teori yang menyangkut sejenis (Sugiyono, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode ini di lakukan pada bagian akuntansi di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dengan cara mengamati segala kegiatan yang terjadi dan mencatat setiap informasi yang di terima. Hal ini di gunakan guna memperoleh informasi mengenai sistem akuntansi pendapatan.

2. Wawancara

Metode ini di lakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. Hal ini di gunakan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi pendapatan. Adapun pertanyaan yang di tanyakan yaitu bagaimana sistem akuntansi pendapatan di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon.

3. Dokumentasi

Metode ini di lakukan untuk mendokumentasikan segala informasi dalam bentuk gambar pada badan pengelola keuangan dan pendapatan yang mendukung penelitian ini. Hal ini di lakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi pendapatan di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu melalui beberapa tahapan di bawah ini:

1. Mengumpulkan data laporan pendapatan yang ada pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon
2. Mengumpulkan data referensi dari jurnal-jurnal yang menyangkut sistem akuntansi pendapatan
3. Mengelola data pendapatan yang di terima dari perusahaan
4. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintahan Kota Tomohon, dengan pemimpin saat ini Bapak Drs. Gerardus Emanuel Mogi. Kota Tomohon adalah salah satu kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Dimana sebelum itu, Tomohon masih merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Minahasa. Seiring dengan berkembangnya waktu, kecamatan Tomohon mengalami kemajuan dengan begitu banyak perkembangan, sehingga ada inspirasi dan aspirasi dari warga Tomohon untuk menjadikan Kecamatan Tomohon berdiri menjadi sebuah kota. Dengan melewati berbagai macam upaya baik internal maupun eksternal akhirnya Tomohon menjadi resmi menjadi sebuah Kota pada tanggal 4 Agustus 2003 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia.

Hasil Penelitian

1. Sistem Akuntansi Pendapatan BPKPD Kota Tomohon

Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan LRA di Badan Pengelola Keuangan, Dan Pendapatan Daerah menggunakan akuntansi berbasis kas (cash based accounting) yang merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Pendapatan LO di Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah menggunakan akuntansi berbasis akrual (accrual based accounting) yang merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan LRA diterapkan basis kas pada tahun yang diteliti tahun 2020-2023, SAP berbasis akrual sudah diterapkan yang mengakui pendapatan, beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Pendapatan LO baru diterapkan di BPKPD pada tahun 2015 yang menggunakan basis akrual. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban.

2. Dokumen Sistem Akuntansi

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP – Daerah)
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR – Daerah)
- Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
- Surat Tanda Setoran (STS)
- Bukti Transfer/ setor
- Jurnal
- Buku Pembantu
- Laporan Keuangan

3. Dokumen Sumber yang di gunakan dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan Di badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon
- Surat Ketetapan Restribusi (SKR) yaitu dokumen yang di buat oleh pengguna Anggaran untuk menetapkan restribusi atas wajib restribusi
 - Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan lainnya
 - Surat tanda setor (STS), yaitu dokumen yaang di selenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah
 - Bukti transfer yaitu, dokumen bukti transfer penerimaan daerah
 - Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah. Contoh-contoh dokumen tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

1. Contoh Surat Ketetapan Retribusi (SKR)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)		NO. URUT :
NAMA ALAMAT NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA TAHUN		
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)	
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah Ketetapan Retribusi				
Jumlah Sanksi: a. Bunga				
Jumlah Keseluruhan				
Dengan huruf :				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan				
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan				
Tanggal				
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran				
(Tanda tangan)				
(nama lengkap)				
NIP.				
TANDA TERIMA		NO. URUT :		
NAMA		Tanggal		
ALAMAT		Yang menerima		
NPWR		(Tanda tangan)		
		(nama lengkap)		

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316

Sumber Data: SE BAKD Nomor 900/316

Gambar 1. Surat Ketetapan Retribusi

2. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
TANDA BUKTI PEMBAYARAN	
NOMOR BUKTI	
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu	
b. Telah menerima uang sebesar Rp	
c. (dengan huruf	
d. Dari Nama	
e. Alamat	
f. Sebagai pembayaran	
Kode Rekening	Jumlah (Rp.)
f. Tanggal diterima uang	
Mengetahui,	Pembayar/Penyetor
Bendahara Penerimaan	
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
(nama lengkap)	(nama lengkap)
NIP.	
Lembar asli	: Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga
Salinan 1	: Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu
Salinan 2	: Arsip

Sumber: SE BAKD Nomor 900/316

Sumber Data: SE BAKD Nomor 900/316

Gambar 2. Dokumen Tanda Bukti Pembayaran

3. Contoh Surat Tanda Setoran

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN KOTA SURAT TANDA SETORAN (STS)				
STS No.			Blank No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar (dengan huruf) (.....)				
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:				
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)	
1				
2				
3				
4				
5				
			Jumlah	
Uang tersebut diterima pada tanggal				
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			Bendahara Penerimaan	
(Tanda tangan)			(Tanda tangan)	
(nama lengkap)			(nama lengkap)	
NIP.			NIP.	

(Catatan: STS diberikan Stp. Setoran Bank)
Sumber: SE BAKD Nomor 900/316

Sumber Data: SE BAKD Nomor 900/316

Gambar 3. Surat Tanda Setoran

Pembahasan

Sistem akuntansi pendapatan di BPKPKD Kota Tomohon mempunyai beberapa dokumen, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP – Daerah)
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR – Daerah)
3. Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
4. Surat Tanda Setoran (STS)
5. Bukti Transfer/ setor
6. Jurnal

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual berganti pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Sehubungan dengan hal tersebut juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi berbasis akrual.

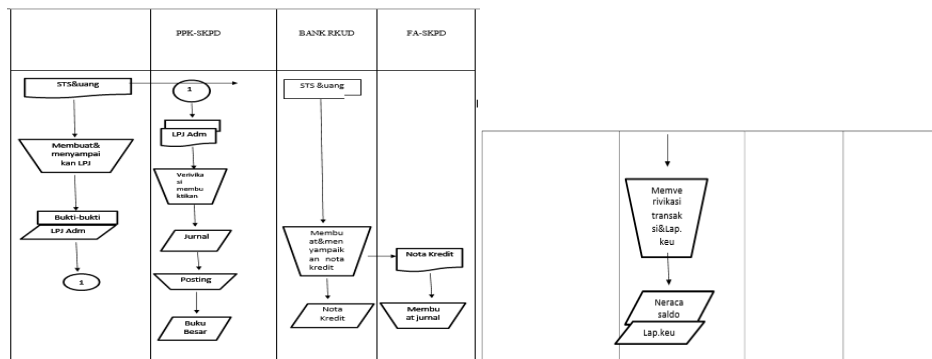
Pada penerapan akuntansi berbasis akrual ini sangat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan dan juga memperlihatkan suatu laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan kemampuan SKPD tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu:

“Pada penerapan akuntansi yang diberlakukan saat ini tentunya sangat membantu kita khususnya dibidang keuangan daerahdikarenakan sebelum diterapkannya basis akrual penuh saat ini, kitadulunya masih menggunakan basis kas menuju akrual dimana kita harus menganalisis yang mana transaksi yang termasuk basis kas kedalam neraca. Hal ini sangat berbeda dengan basis akrual dimanatransaksi tersebut ketika dimasukkan datanya sudah jelas”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon telah berpedoman pada Pemendageri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual, dimana pada basis tersebut setiap transaksi langsung dicatat meskipun pendapatan atau belanja belum diterima. Namun, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon ada beberapa pencatatan yang tidak sesuai dengan pemendageri yang berlaku. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Christofel S Manangka selaku Kabid Akuntansi Keuangan bahwa :

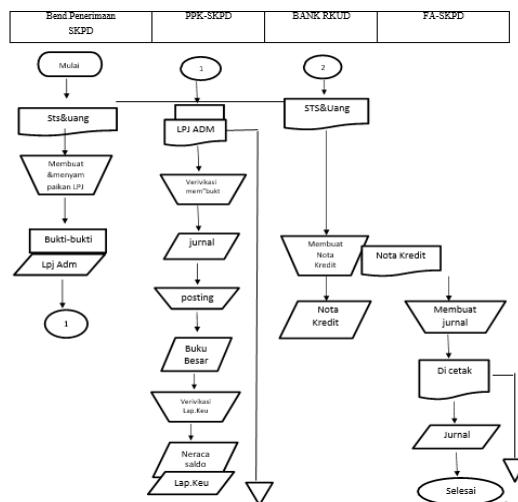
“Terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan belum langsung dicatat seperti pada pembelian perlengkapan yang tidak langsung dicatat, dan akan dicatat ketika sudah diminta bukti transaksi tersebut sehingga baru dicatat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah sesuai dengan sistem akuntansi basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.



Sumber Data: BPKPD Kota Tomohon, 2024

Gambar 4. Bagan Alir Prosedur Akuntansi Pendapatan



Sumber Data: Data olahan, 2024

Gambar 5. Flowchart Usulan Peneliti

Berdasarkan Flowchart Akuntansi Pendapatan di SKPD dapat di jelaskan sebagai berikut;

1. Bendaharaan penerimaan menyetorkan uang yang di terimanya ke RKUD dengan menggunakan STS. Bendaharaan penerimaan membuat dan menyampaikan LPJ administratif dan Bukti-bukti pendukungnya ke pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setiap bulan. Pada hakekatnya prosedur akuntansi pendapatan di mulai saat PPK-SKPD menerima dan memverifikasi LPJ Administratif tersebut.
2. PPK-SKPD Menerima dan melakukan verifikasi atas LPJ administratif. Berdasarkan penerimaan kemudian membukukan/menjurnal transaksi pendapatan dan penyetorannya secara Kronologis.
3. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar bisa di akhir hari, akhir minggu atau akhir bulan
4. PPK-SKPD membuat neraca saldo pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan (minimal satu tahun sekali, yaitu setiap akhir bulan anggaran)
5. PPK SKPD membuat laporan keuangan pada setiap akhir periode tertentu (minimal satu tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran)
6. Atas setoran dari bendahara penerimaan, Bank RKUD membuat nota kredit dan menyampaikan ke fungsi akuntansi di SKPD
7. Fungsi Akuntansi di SKPD sebagai konsolidator membukukan dan menjurnal transaksi pendapatan yang tertera dalam nota kredit, untuk kepentingan konsolidasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan oleh peneliti, bahwa sistem akuntansi pendapatan di kota tomohon belum efektif dan efisien hal ini di karenakan adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang di lakukan oleh instansi BPKPD Kota Tomohon. Hal ini juga dapat di lihat dari sistem akuntansi pendapatan di mana pendapatan restribusi daerah menurun pada Tahun 2022-2023. Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Kota Tomohon harus melakukan lebih banyak upaya baik dari sisi sumber daya manusia yang berkaitan maupun alat manajemen yang mengatur proses pelaporan keuangan. Instansi perlu melakukan lebih banyak lagi melakukan pelatihan serta evaluasi terhadap tingkat pemahaman tentang proses pencatatan laporan keuangan sehingga organisasi dapat mencegah keterlambatan penyampaian laporan keuangan sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 1. Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Tahun 2020)

No	Uraian	Anggaran (2020)	Realisasi (2020)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	23.659.784.148	21.066.997.354	88,78%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.952.836.642	7.775.914.307	38,97%
Total PAD 2020		54.163.740.488	37.076.155.678	68,45%

Sumber: BPKPD Kota Tomohon (2020)

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pendapatan untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 sebesar 21.066.997,354,00 yang terdiri dari pandapatan pajak daerah dan pendapatan Restribusi Daerah.

Tabel 2. Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Tahun 2021)

No	Uraian	Anggaran (2021)	Realisasi (2021)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	25.400.000.000	25.482.015.868	100,32%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	22.300.712.328	29.739.341.017	133,36%
Total PAD 2021		52.683.366.556	59.733.273.584,15	113,38%

Sumber: BPKPD Kota Tomohon (2021)

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pendapatan untuk tahun berakhir 31 Desember 2021 sebesar 59.733.273.584,15 yang terdiri dari pandapatan pajak daerah dan pendapatan Restribusi Daerah.

Tabel 3. Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Tahun 2022)

No	Uraian	Anggaran (2022)	Realisasi (2022)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	32.980.000.000	28.842.474.244	87,45%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.524.913.000	13.537.713.913	77,25%
Total PAD 2022		56.621.936.630	49.458.534.505	87,35%

Sumber: BPKPD Kota Tomohon (2022)

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pendapatan untuk tahun berakhir 31 Desember 2022 sebesar 49.458.534.505,64 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan Restribusi Daerah.

Tabel 4. Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Tahun 2023)

No	Uraian	Anggaran (2023)	Realisasi (2023)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	36.576.000.000	28.947.262.458	79,14%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.675.000.000	10.441.226.522	62,61%
Total PAD 2023		60.692.694.971	45.621.779.435	75,16%

Sumber: BKKPD Kota Tomohon (2023)

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah pendapatan untuk tahun berakhir 31 Desember 2023 sebesar 45.621.779.435,93 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan Restribusi Daerah. Berdasarkan 4 tabel diatas, dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran pada pajak daerah meningkat secara signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dengan rata – rata 88,92% . Pendapatan pajak daerah ini menunjukkan bahwa PAD dalam Pajak Daerah meningkat selama 4 tahun sehingga Pemerintah Kota Tomohon dapat mengelola potensi daerahnya dengan baik dan memanfaatkan potensial kekayaan semaksimal mungkin dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyara Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran pada retribusi daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan baik dari data-data maupun informasi penelitian yang kemudian dianalisis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah Kota Tomohon terlebih khusus pada akuntansi pendapatan. Maka dapat ditarik kesimpulan, Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintah sehingga peneliti menemukan masalah yang ada seperti dalam latar belakang tentang keterlambatan serta kesalahan dalam pencatatat laporan keuangan. Hal ini sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlakusebagai berikut : Laporan pendapatan pajak daerah terjadi peningkatan pada tahun 2019-2023 terjadi peningkatan sedangkan laporan realisasi anggaran retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2022-2023. Hal ini menunjukan bahwa menerunya efesiensi dan efektivitas Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyawati, D. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Baubau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.257>
- Angow, G., Ilat, V., & Afandi, D. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 885–892. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46509>
- Anto, L. O., Awaluddin, I., & Suwarno, T. E. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset & Pendapatan Daerah

- Kabupaten Muna Barat. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6(2).
<https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i2.22225>
- Bawonse, S. B., & Tinangon, J. J. (2021). Evaluasi Sistem Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Uang Persediaan Pada Dinas Sosial Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*, 9(1), 355–364. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32175>
- Bilalang, J. S., Warongan, J. D. L., & Datu, C. (2021). Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(21), 173–181.
- Dharmadiaksa, I. B. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Dan Kesesuaian Tugas Padakerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2).
- Halim, A. (2008). *Akuntansi keuangan daerah* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS SRIWIJAYA*, 16(1). <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Maulana Yusuf, Mellya Embun Baining, & Nurul Pebriyanti. (2022). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(2), 39–42. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i2.719>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
http://www.academia.edu/download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.docx
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12, 144 (2019).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Renaldo, R., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Sosial Kota Magelang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(06), 856–867. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.294>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tuasamu, Z., Lewaru, N. A. I. M., Idris, M. R., Syafaat, A. B. N., Faradilla, F., Fadlan, M., Nadiva, P., & Efendi, R. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Menggunakan DFD Dan Flowchart Pada Bisnis Porobico. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen(JURBISMAN)*, 1(2), 495–510. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/181>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17.